



**KEKALAHAN GOLKAR DALAM PEMILU TAHUN 1977 DI
DKI JAKARTA**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun Oleh:

**Roberto Romario
NIM: 13030114140105**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Saya Roberto Romario, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi yang lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 23 Agustus 2019
Penulis,

Roberto Romario
NIM 13030114140105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap huruf berloncatan mencari jodoh membentuk kata; setiap kata meliuk, melesat, dan mungkin saling bertabrakan dan rebutan mendapatkan jodoh untuk membentuk daya puitik. Setiap huruf mempunyai ruh, mempunyai nyawa, dan memilih kehidupannya sendiri.”

-Leila S. Chudori-

“Hidup itu seperti hentakan kaki di atas tanah; setiap hentakan kaki amat menentukan arah kehidupan seseorang.”

-Penulis-

Dipersembahkan untuk:

Bapak, Mama, Kakak, dan
Adiku tersayang.

Skripsi dengan judul “Kekalahan Golkar Dalam Pemilu Tahun 1977 di DKI Jakarta” yang disusun oleh Roberto Romario (13030114140105) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada Agustus 2019.

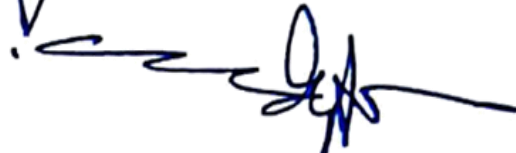
Ketua,



Dr. Alamsyah, M. Hum.

NIP 19721119 199802 1 002

Anggota I,



Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum.

NIP 19640711 199001 1 001

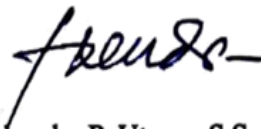
Anggota II,



Drs. Sugiyarto, M. Hum.

NIP 19550807 198903 1 002

Anggota III,

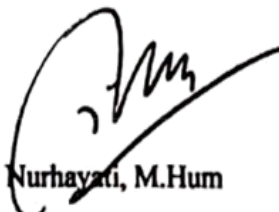


Mahendra P. Utama, S.S., M. Hum.

NIP 19710224 199303 1 001

Mengesahkan,

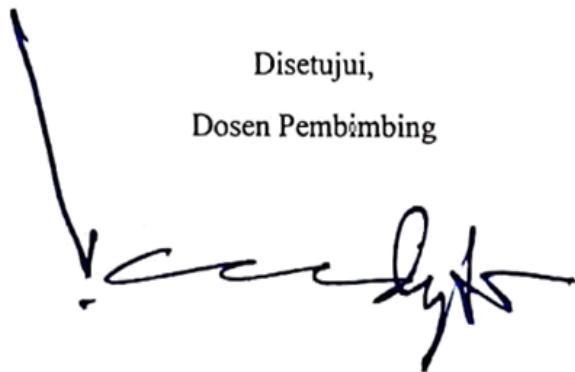
Dekan



Dr. Nurhayati, M. Hum

NIP 196610041990012001

Disetujui,
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indriyanto', with a long horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending upwards from the left.

Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum.

NIP 19640711 199001 1 001

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya atas kemurahan dan kasih setia yang besar, skripsi yang berjudul “Kekalahan Golkar Dalam Pemilu Tahun 1977 di DKI Jakarta” dapat terselesaikan sebagai syarat utama untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (Strata-I) pada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi ini tidak akan berhasil disusun tanpa adanya bantuan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada, yang penulis hormati: Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah memberikan izin dan kemudahan Pada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar berkenan untuk memberikan bimbingan, pengarahan, keluasan wawasan, motivasi, serta kemudahan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana sekarang ini. Segala sesuatu yang baik dalam skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi besar beliau.

Penulis juga melantunkan ucapan terima kasih kepada Rabith Jihan Amaruli, S.S., M. Hum., selaku Dosen Wali penulis, yang telah memberikan perhatian kepada penulis selama proses perkuliahan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada segenap dosen di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah berkenan memberikan pelajaran intelektual, motivasi, inspirasi, serta pengalaman yang sangat berharga dalam membentuk dan mengembangkan karakter penulis selama menjadi mahasiswa di jurusan ini, terutama untuk segenap dosen penguji: Dr. Alamsyah, M. Hum., Drs. Sugiyarto, M. Hum, serta Mahendra Pudji Utama, S.S., M. Hum., yang telah berkenan untuk memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam

proses pengujian skripsi ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada seluruh karyawan baik di Departemen Sejarah maupun karyawan di dalam lingkup FIB Undip, khususnya Mbak Fatma, Mas Oscar, dan Pak Romli yang telah berkontribusi besar terhadap kelancaran studi penulisan selama ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan pula kepada pihak-pihak dari Kepala dan staf yang bekerja di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan Golkar dan Pemilu 1977 DKI Jakarta. Tidak ketinggalan ucapan terima kasih penulis kepada seluruh karyawan Perpustakaan Nasional Koran Salemba yang membantu penulis dengan sabar dalam mengizinkan penulis untuk mengumpulkan sumber surat kabar cetak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap staf yang bekerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka yang membantu penulis dalam mengumpulkan sumber majalah yang didalamnya terdapat rubrik wawancara dan Foto peristiwa kampanye dan saat berlangsungnya pemungutan suara Pemilu 1977. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada segenap karyawan di Dipo Arsip Suara Merdeka Semarang, Kompas Biro Jawa Tengah, dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah khususnya Mas Joseph Army yang telah memberi wejangan kepada penulis untuk menentukan topik penelitian yang sesuai dengan kemampuan penulis dan menemukan sumber surat kabar cetak di awal penulisan proposal untuk pembuatan tabel sumber penelitian yang mendukung penulisan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada dua orang tua penulis, Mudin Sidabutar dan Ardina Nainggolan yang tidak henti-hentinya memberi dukungan baik materill, kasih sayang, doa, maupun dorongan untuk penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Diponegoro. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan beliau berdua, baik keadaan senang dan sulit. Berikutnya terima kasih juga kepada kakak dan adik perempuan terkasih: Debby Steffanie dan Clara Augloria, yang telah memberi semangat dan doa kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menemani, memotivasi, serta memberikan kontribusi yang besar bagi penulis selama proses perkuliahan sampai penulisan skripsi berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di departemen ini. Rasa terima kasih dan hormat penulis tujukan kepada Bapa dan Ibu Kos mulai dari penulis menetap di kosan dan berpindah-pindah kosan mencari tempat kondusif dan nyaman untuk ditempati selama perkuliahan hingga penulis harus kembali ke tempat asal penulis di Bekasi. Kemudian untuk teman-teman yang telah mengisi hari-hari penulis selama ini khususnya untuk Radian Satriyo, Pramono Pasaribu, Nico Rinaldi, Daniel, Akbar, Rama, Prayogo, Andreas David, Aditya Sihombing, Toha, Frans, Elfrianus, Mikel, Irfan, Destio, Dame, Mery, dan Bunga yang telah penulis anggap lebih dari sekedar teman bercerita dan berkeluh kesah selama perkuliahan, mereka yang sudah penulis anggap sebagai keluarga.

Tidak kalah pentingnya penulis ucapkan rasa terima kasih kepada teman yang telah bersedia mendukung, memotivasi, dan menemani proses pendewasaan selama masa perkuliahan, seluruh teman-teman di Departemen Sejarah Undip, khususnya Angkatan 2014; Azwin, Faisal, Sarah, Tomi, Aditya Ray, Olga, Mangir, Restu, Amir, Arifin, Syahrianto, Doni, Erick, Trisno, Nico, Daksa, Rangga, Rickey, Mellya, Nurul, Rina, Fijar, Yulita, Ardian, dan, segenap teman-teman di kelas A, B dan C, serta teman-teman satu Angkatan yang tentu tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada kalian. Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kakak tingkat Sejarah 2011, 2012, dan 2013 yang sudah banyak memberikan saran dan masukan selama ini, serta adik-adik Sejarah, 2015 dan 2016 yang telah ikut memberi dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta penulis ucapkan terima kasih kepada Kiki Aprilliani Nainggolan dari Politeknik Kesehatan Medan yang saat ini sedang berdinis di Nusa Tenggara Timur (NTT), atas dukungan personal lewat doa dan harapan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan hal-hal lainnya. Semoga skripsi ini menjadi awal dari harapan orang tua di sana, walaupun saat ini jarak memisahkan.

Sebagai penulis pemula skripsi ini tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, semua saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademisi dan media pembelajaran bagi orang-orang yang merasa kering akan pengetahuan.

Dengan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak dan mohon maaf yang terdalem jika penulis berbuat hal-hal yang kurang berkenan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak.

Sebagai akhir kata, penulis mengutip kalimat sederhana yang dituliskan oleh Buya Ahmad Syafii Maarif: *Kitab suci memberi optimisme. Tuhan tidak netral sepanjang sejarah. Ada intervensi Tuhan kepada kelompok tertentu. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang mau bekerja keras dan berusaha. Kalau tidak belajar, Tuhan diam, tidak berpihak.*

Semarang, 23 Agustus 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II SITUASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK TAHUN 1977 DI DKI JAKARTA	26
A. Situasi Politik di DKI Jakarta	26
B. Profil Golkar DKI Jakarta	34
1. Latar Belakang Pembentukan Golkar DKI Jakarta	34
2. Visi-Misi, Tujuan, Doktrin dan Ikrar Golkar DKI Jakarta	39
3. Tugas DPD I Golkar DKI Jakarta	42
C. Politik Fusi Penantang Golkar pada Pemilu 1977 di DKI Jakarta	45

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 DI DKI JAKARTA	56
A. Landasan Hukum Pemilu 1977	56
B. Partai Politik Peserta Pemilu 1977	70
C. Penyelenggaraan Pemilu	78
1. Kampanye Pemilu 1977	78
2. Pemungutan Suara Pemilu 1977	100
BAB IV KEKALAHAN GOLKAR PADA PEMILU TAHUN 1977 DI DKI JAKARTA	110
A. Kekalahan Golkar sebagai Implikasi Sikap Politik Pemerintah	110
1. Kegagalan DKI Jakarta sebagai Barometer Perolehan Suara Golkar	110
2. Sebab-Sebab Kekalahan Golkar di DKI Jakarta dalam Persaingan Pemilu 1977	115
B. Pengaruh Kekalahan Golkar Pada Pemilu 1977 Terhadap Para Kontestan	132
1. Posisi Tokoh PDI dan PPP Pemilu 1977	133
2. Memantapkan Posisi Politik PPP Setelah Pemilu 1977 di DKI Jakarta	141
BAB V SIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD/ART	: Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
Caleg	: Calon Legislatif
Deppen	: Departemen Penerangan
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FDP	: Fraksi Demokrasi Pembangunan
FKP	: Fraksi Karya Pembangunan
FPP	: Fraksi Persatuan Pembangunan
G 30 S	: Gerakan 30 September
Gakari	: Gerakan Karya Rakyat Indonesia
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Golkar	: Golongan Karya
GUPPI	: Gabungan Usaha Pembangunan Pendidikan Islam
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia

KAPPI	: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KASI	: Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
Kaskopkamtib	: Kepala Staf Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban
Kosgoro	: Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong
Kino	: Kelompok Induk Organisasi
Korpri	: Korps Pegawai Republik Indonesia
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
Ormas Hankam	: Organisasi Massa Pertahanan dan Keamanan
Menkeh	: Menteri Kehakiman
Menpen	: Menteri Penerangan
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
MKGR	: Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Munas	: Musyawarah Nasional
Murba	: Musyawarah Rakyat Banyak
Muspida	: Musyawarah Pimpinan Daerah
Muspika	: Musyawarah Pimpinan Kecamatan
NU	: Nahdlatul Ulama
Pansus	: Panitia Khusus
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
Parpol	: Partai Politik

Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pileg	: Pemilihan Legislatif
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPD	: Panitia Pemilihan Daerah
Rantap	: Rancangan Ketetapan
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Sekber	: Sekretariat Bersama
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	: Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH*¹

- Assooy* : Istilah yang dipopulerkan oleh Haji Rhoma Irama dalam kampanye PPP pada Pemilu 1977 untuk menggambarkan ekspresi kegembiraan
- Demokrasi Pancasila* : Demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Demokrasi Terpimpin* : Corak pemerintahan yang untuk pertama kali dipakai secara resmi di dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956, ketika membuka Konstituante yaitu corak demokrasi yang mengenal satu pimpinan menuju tujuan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial.
- Dwifungsi ABRI* : Fungsi rangkap yang dijalankan ABRI, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan sebagai kekuatan sosial.
- Fraksi* : Kelompok orang yang mempunyai dan memperjuangkan suatu aliran politik dalam parlemen atau dewan-dewan perwakilan.
- Fusi* : Peleburan; penggabungan; penyatuan. Beberapa perhimpunan (partai) yang dilebur menjadi satu, seperti umpamanya di jaman penjajahan Belanda: Jong Java, Pemoeda Soematra, Jong Ambon, Jong Celebes, Pemoeda Indonesia dilebur menjadi satu: "Indonesia Moeda". Sejak 1973 di Indonesia terdapat fusi dari beberapa partai dengan

¹Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasarkan pada pendapat para ahli dalam buku-buku, kamus politik, dan karya ilmiah lainnya.

terbagi dalam: Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI, fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Partai Murba), Partai Persatuan Pembangunan (PPP, fusi dari NU, Parmusi, Perti, PSII).

- Golongan C* : Warga negara RI yang terlibat dan atau diduga terlibat secara tidak langsung dalam G 30 S/PKI yang terdiri dari golongan C1, C2, C3. (Keppres Nomor 20 tahun 1976)
- Golongan C1* : Golongan C yang menutut antiseden yang ada, pernah terlibat dalam peristiwa Madiun dan setelah peristiwa pemberontakan G30S, baik dalam tindakan maupun ucapan-ucapannya cenderung untuk senantiasa menguntungkan sisa-sisa G30S dan tidak secara tegas menentangnya walaupun menurut kondisi dan kemampuan yang wajar dimungkinkan untuk menentangnya. (Keppres No. 28: 1975)
- Golongan C2* : Golongan C yang menjadi anggota biasa bekas organisasi terlarang yang seases dengan atau bernaung atau berlindung di bawah bekas PKI. (Kepres No. 29: 1975)
- Golongan C3* : Golongan C yang bersimpati kepada G30S melalui sikap lahir, perbuatan-perbuatan atau tulisan-tulisan, tetapi tidak jelas perannya dalam kegiatan-kegiatan secara fisik peristiwa pemberontakan G30S. (Kepres No. 28: 1975)
- Golongan Fungsional* : Kekuatan-kekuatan potensi nasional dalam masyarakat Indonesia yang tumbuh dan bergerak secara dinamis dan efektif dalam perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik.
- Juru Taman* : Istilah yang digunakan Mendagri Amirmachmud untuk menggambarkan Partai Politik dalam menjaga suasana kampanye supaya saling memelihara, memupuk, mengembangkan tanaman yang memiliki manfaat, dan menghilangkan tanaman yang dapat merusak integritas keindahan dan manfaat bagi masyarakat luas.

<i>Kafilah</i>	: Rombongan orang yang berpergian di padang pasir dengan berkendara unta atau keledai; kontingen.
<i>Kafir</i>	: Orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya; atau mendurhakai ajaran-ajarannya.
<i>Kedaulatan Rakyat</i>	: Asas ketatanegaraan, bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada dalam tangan rakyat seluruhnya. Rakyat memberi legalitas dan kekuasaan pada pemerintah (negara) dan melindungi diri terhadap penyalahgunaan kekuasaan ini dengan menyatakan hak-hak asasi para warga negara, memberi kekuasaan pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
<i>Kegiatan Terlarang</i>	: Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kegiatan G 30 S/PKI dengan organisasi massanya dan kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
<i>Komando Jihad</i>	: Istilah yang dipakai oleh Orde Baru untuk memojokan lawan politik Golkar di setiap penyelenggaraan Pemilu Orde Baru
<i>Konsensus</i>	: Kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, sikap, dan lain-lain yang dicapai melalui kebulatan suara atau pendapat.
<i>Konsiderans</i>	: Pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan dan sebagainya.
<i>Legitimasi esensial</i>	: Keterangan mendasar yang bersifat mensahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud.
<i>Lobi</i>	: Bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan pihaknya.

- Massa Mengambang* : Istilah Massa Mengambang dalam kamus politik Indonesia mempunyai arti konotasi khusus ketika digunakan pemerintah Orde Baru yang melarang penduduk di kecamatan dan desa atau kelurahan menjadi anggota atau pendukung dan simpatisan Partai Politik kecuali Golkar. Partai Politik kecuali Golkar juga dilarang memiliki struktur kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.
- Materiil-Spirituil* : Jargon afiliasi politik bagi Partai Politik yang didorong untuk berfusi pada masa Orde Baru dengan suatu penekanan dalam aspek nasional (jasmani/fisik).
- Monoloyalitas* : Kebijakan Orde Baru yang mengharuskan pegawai negeri sipil agar memberikan pilihan politiknya hanya kepada Golkar; Kesetiaan tunggal yang tidak terbagi terhadap satu orang, perkumpulan, negara, dan sebagainya.
- Nasakom* : Singkatan dari Nasional Agama Komunis. Nasakom dimaksudkan oleh Soekarno sebagai wadah golongan nasionalis, golongan agama dan golongan komunis. Soekarno dengan Nasakomnya berhasil pada waktu singkat untuk menguasai bidang politik, tapi ia sama sekali tidak mampu memperbaiki perekonomian serta kehidupan rakyat banyak yang dari hari ke hari semakin memburuk dan semakin parah keadaannya, semakin sengsara dan semakin tidak pasti akan hari esok. Dengan gagalnya G30S 1965 maka Nasakom pun hilang lenyap dengan sendirinya.
- Orde Baru* : Istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998.
- Orde Lama* : Sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di

	bawah kepemimpinan Soekarno pada tahun 1959 hingga tahun 1966.
<i>Organisator</i>	: Orang yang menyusun suatu organisasi dan mempunyai kecakapan menyusun organisasi.
<i>Piagam Jakarta</i>	: Piagam atau naskah yang disusun dalam Rapat Panitia Sembilan berupa kompromi antara Pihak Islam dan Pihak Kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara.
<i>Polarisasi Sosial Politik</i>	: Menajamnya pertentangan di dalam satu kelompok masyarakat.
<i>Rehabilitasi</i>	: Pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang atau organisasi yang telah dituduh secara tidak mendasar atau dilanggar kehormatannya.
<i>Rekonsiliasi</i>	: Perbuatan memulihkan kepada keadaan semula; rukun kembali; memperbaiki kembali seperti semula.
<i>Rekonstruksi</i>	: Penyusunan atau penggambaran kembali.
<i>Subversi</i>	: Dalam arti sempit berarti menggulingkan atau menumbangkan pemerintah atau pola masyarakat, di luar undang-undang.
<i>Spirituil-Materiil</i>	: Jargon afiliasi politik bagi Partai Politik yang didorong untuk berfusi pada masa Orde Baru dengan suatu penekanan dalam aspek agama (rohani/batin).
<i>Ulama</i>	: Orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.
<i>Wakil Rakyat</i>	: Orang-orang yang duduk sebagai anggota badan perwakilan rakyat di segala tingkatan (DPRD II, DPRD I, DPR, MPR); utusan rakyat.
<i>Walk Out</i>	: Tindakan meninggalkan ruang sidang ketika sidang masih berlangsung sebagai protes. Protes dapat mencakup materi sidang, tata tertib dan kebijakan organisasi atau partai.

Walk Out sering terjadi pada sidang-sidang DPR, pleno, komisi, atau sidang panitia khusus.

Warga Negara

: Penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel:

2.1	Daftar 10 Partai Politik sebelum Politik Fusi di DKI Jakarta	50
2.2	Daftar 4 Partai Politik Kelompok Spirituil-Materil	52
2.3	Daftar 5 Partai Politik Kelompok Materil-Spirituil	55
3.1	Daftar Kegiatan Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai Politik pada Pemilihan Umum 1977 di DKI Jakarta	72
3.2	Daftar Calon Sementara Pemilu Tahun 1977 Anggota DPRD Tingkat-I Daerah Pemilihan DKI Jakarta	76
3.3	Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 1977 Anggota DPRD Tingkat-I Daerah Pemilihan DKI Jakarta	77
3.4	Daftar Penghitungan Suara DPR Pemilu 1977 di DKI Jakarta.....	106
3.5	Daftar Penghitungan Suara DPRD Pemilu 1977 di DKI Jakarta.....	107
4.1	Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 1971 di DKI Jakarta	117
4.2	Perolehan Suara DPRD-I PDI pada Pemilu 1977 di DKI Jakarta	136
4.3	Perolehan Suara DPRD Tingkat-I PPP pada Pemilu 1977 di DKI Jakarta	144

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1 Kampanye Golkar di Lapangan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, dengan pembicara Menteri Luar Negeri Adam Malik	82
2.2 Kampanye Golkar pada Pemilu 1977 di Lapangan Prisma, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan Pembicara Tony Brawidjaya, Heru Suparto, Oka Diputra	89
2.3 Suasana massa Golongan Karya (Golkar) saat mendengarkan orasi politik dalam kampanye Golkar	89
2.4 Achmad Royani saat menyampaikan orasi politik dalam kampanye Golkar ditemani oleh Ny. Nelly Adam Malik	90
3.1 Ekspresi massa Golongan Karya (Golkar) saat Juru Kampanye meneriakkan yel-yel kampanye	90
3.2 K.H. Syariffudin menyampaikan orasi politiknya di Lapangan Senen, Jakarta Pusat	91
3.3 Massa Kampanye Golkar saat meneriakkan dan memperagakan yel-yel di Lapangan Senen, Jakarta Pusat	92
3.4 Ribuan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memadati Lapangan Anggrek, Petamburan, Jakarta Barat	93
4.1 Kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Lapangan Anggrek, Petamburan, Jakarta Barat, dengan pembicara Syukron Makmun dan Hasyim Adnan dengan didampingi tamu undangan	93
4.2 Syukron Makmun saat membawakan orasi politik di Lapangan Anggrek, Petamburan, Jakarta Barat	94
4.3 Massa Partai Persatuan Pembangunan saat mendengarkan orasi politik dengan membentangkan atribut kampanye	94
4.4 Kampanye Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan pembicara, yaitu: 1. Imron Marhaeni, 2. Suryadi, 3. A.P. Batubara, 4. Sabam Sirait	96
5.1 Ekspresi massa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) saat pembicara meneriakkan yel-yel kampanye	96

5.2	Suasana pencoblosan pemilu 1977 saat seorang warga menerima surat suara dari panitia pemilihan di TPS X, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.....	102
5.3	Suasana pencoblosan pemilu 1977 saat seorang warga hendak mengisi buku tamu di hadapan panitia pemilihan di TPS X, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.....	102
5.4	Presiden Soeharto dan Bu Tien Soeharto meninjau pelaksanaan pencoblosan di TPS Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	109
5.5	Presiden Soeharto saat meninjau pelaksanaan Pencoblosan di TPS Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan	109

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran:

A.	Pidato Sambutan Presiden Soeharto pada Acara Munas Golkar Ke-II Tahun 1973 di Surabaya.....	170
B.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	175
C.	Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum.....	179
D.	Dewan Pertimbangan Agung RI 1977-1999 tentang Masalah Pelaksanaan Pemilu 1977	184
E.	Laporan tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu 1977 DKI Jakarta	190
F.	Laporan Penghitungan Suara Daerah Tingkat I: PPD Tingkat I DKI Jakarta	216
G.	Pidato Sambutan Presiden Soeharto pada Acara Munas Golkar Ke-II tahun 1978 di Bali	221
H.	Susunan Personalia DPD Tingkat I Golkar DKI Jakarta Tahun 1973-1979	225

RINGKASAN

Skripsi ini mengkaji permasalahan terkait “Kekalahan Golkar Dalam Pemilu Tahun 1977 di DKI Jakarta” dan mengetahui gambaran yang mendalam terkait dengan hasil kontestasi dalam pemilu. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah mengapa Golkar mengalami kekalahan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kekalahan Golkar.

Pada mulanya, Golkar merupakan organisasi politik peserta Pemilu yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan berhasil memenangkan kontestasi Pemilu 1971 di DKI Jakarta. Partai politik tersebut masih digunakan oleh pemerintah sampai dengan kontestasi Pemilu 1977 dalam pertarungan politik di DKI Jakarta. Kekalahan Golkar dalam Pemilu 1977 diawali dari upaya Pemerintah Orde Baru memenangkan kontestasi pemilu 1977 melalui sikap politik yang ditunjukkan baik kepada partai politik maupun pimpinan daerah tempat penyelenggaraan pemilu dengan menyalahkan masing-masing pihak. Tuduhan yang dibuat Golkar kepada PPP membuat berkurangnya simpati Umat Islam DKI Jakarta yang menimbulkan dampak menurunnya perolehan suara Golkar dan mengakibatkan kekalahan Golkar dalam kontestasi Pemilu 1977 di DKI Jakarta.

Penelitian ini mencoba mengungkap hal-hal di sekitar kekalahan Golkar untuk pertama kalinya terhadap PPP di wilayah DKI Jakarta. Pertanyaan inti yang diajukan dalam penelitian ini adalah: pertama bagaimana situasi politik dan partai-partai di Jakarta tahun 1977, kedua bagaimana pelaksanaan pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta, ketiga bagaimana implikasi sikap politik pemerintah terhadap kekalahan Golkar pada pemilu 1977 di DKI Jakarta, keempat mengapa Golkar mengalami kekalahan pada pemilu 1977 di DKI Jakarta, dan kelima apa faktor penyebab kemenangan PPP di Jakarta. Hasil penelitian ini menegaskan, bahwa ikatan emosi yang dibangun partai politik kepada massa partai khususnya masyarakat, begitu mempengaruhi dalam hal perolehan suara yang didapat dalam kontestasi pemilu, ikatan emosi merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam meraup suara.

ABSTRACT

This thesis examines the problem related to "The Defeat Golkar in Election 1977 in DKI Jakarta" and knowing the indepth imagery is related to the results of contestation in the elections. The problem that is examined in the writing of this thesis is why Golkar suffered from defeat and what factors behind Golkar's defeat.

In the beginning, Golkar was the political organization of the electoral participants used by the new Order government and succeeded in winning the 1971 election contestation in DKI Jakarta. The political party was still used by the government until the contestation of 1977 election in political fight in DKI Jakarta. Golkar's defeat in the 1977 election was initiated by the New Order Government's efforts to win the contestation of 1977 elections through political attitudes presented both to the political party and regional leadership where the elections were to blame Each party. Golkar's allegations to PPP made a reduction in the sympathies of the DKI Jakarta Muslims, which caused the impact of Golkar's acquisition of votes and resulted in the defeat of Golkar in the contestation of the 1977 election in DKI Jakarta.

His study tried to reveal things around Golkar's defeat for the first time against PPP in DKI Jakarta. The core questions posed in this study are: first how the political situation and the parties in Jakarta in 1977, both how the election year of the 1977 elections in DKI Jakarta, third how the implications of government's political stance on Golkar's defeat at the 1977 election in DKI Jakarta, the fourth why Golkar suffered defeat at the 1977 elections in DKI Jakarta, and fifth what is the contributing factor of PPP victory in Jakarta. The result of this research confirms that the emotional bonds built by political parties to the party masses, especially the public, are affecting the acquisition of votes gained in the electoral contestation, emotional bonds are a factor that cannot be ruled out in raked voices.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Politik Identitas sudah lama menjadi pembicaraan hangat bagi akademisi terutama peneliti ilmu-ilmu sosial. Pemilu 2 Mei 1977 menjadi Pemilu kedua yang dilaksanakan Orde Baru, dan kali pertama NU ikut bersama PPP. Namun demikian, setahun sebelum Pemilu, tokoh tarekat besar dari kalangan NU, KH. Mustain Ramli, masuk Golkar dan membawa sebagian massa tarekat ke Golkar. Fenomena ini secara langsung membawa dampak perpecahan di tubuh organisasi tarekat NU, dan membuat suara Golkar bertambah sumbangannya dari massa NU. Dalam Pemilu tahun 1977, PPP serius dengan membawa bendera Ka'bah untuk memenangkan Pemilu. Melalui kekompakan dan semangat yang terkait di antara unsur unsur Islam yang tergabung dalam PPP, PPP bersikeras tampil kritis di hadapan pemerintah.²

Kampanye penuh semangat yang dilakukan oleh PPP membawa dampak positif dalam Pemilu tahun 1977. Hal itu bisa dilihat dari peningkatan suara sebanyak dua persen dari gabungan suara keempat partai yang dibentuk pada tahun 1971, itu berarti lebih banyak lima kursi di DPR dari Pemilu sebelumnya dengan total 99 kursi DPR. Kemenangan moral bagi PPP adalah kemenangannya di Jakarta, kampanye dianggap lebih adil karena terdapat kedutaan-kedutaan besar, koresponden asing, dan andil besar Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Meskipun PPP, PDI, dan Golkar memberikan daftar panjang tindakan berlebih para pesaingnya, kampanye pemerintah lebih memaksa dan menakutkan daripada Pemilu 1971. Walaupun partai tetap bermasalah, kemenangan Golkar dalam Pemilu

²Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergaulan Politik dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), hlm. 237-238.

1977 secara nasional tidak memberikan energi baru bagi Golkar. Bahkan, terdengar adanya kesuraman dan keputusasaan dalam Golkar akibat sedikit menurunnya suara, terutama karena prediksi Golkar yang memperkirakan kemenangan hingga 70 persen.³

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) adalah realisasi dari upaya yang telah dirintis sejak jaman Demokrasi Terpimpin. Ia lahir tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama Sekber Golkar. Wadah baru ini menghimpun hampir 300 macam organisasi fungsional-non politis, yang berorientasi kepada karya dan kekaryaan, yang dulunya tidak berorientasi kepada politik dengan tiga organisasi sebagai tulang punggungnya, yaitu SOKSI, MKGR, dan KOSGORO. Kehadiran Sekber Golkar pada masa Orde Baru ini dapat dipandang sebagai realisasi dari keinginan para elit politik, yang dalam kurun waktu pertama Orde Baru ini digantikan oleh ABRI ditambah teknokrat sebagai pengganti kaum sipil pada masa Orde Lama, dalam rangka pembaharuan politik di Indonesia. Pembentukan institusi politik dengan struktur politik yang ditata dalam rangka menopang usaha pembangunan telah memberikan corak baru terutama jika dilihat dari segi elite politik, baik yang ada di Kementrian Negara, DPR, dan Mahkamah Agung maupun Partai Politik.⁴

Kemunculan Orde Baru beserta Generasi 1966 melalui aktivitas politik yang dilakukan, dianggap sebagai bentuk penolakan dari beberapa kebijakan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Tindakan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yang mengalami penolakan, yaitu terutama dibebaskannya para tahanan politik dari PSI dan Masyumi. Meskipun begitu pada tahun 1966 Angkatan Darat mendominasi perpolitikan nasional, para mantan pemimpin Masyumi memiliki harapan tinggi dilakukan suatu rehabilitasi terhadap partai Masyumi. Ada harapan di kalangan Islam untuk menegosiasikan kembali status

³David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 358.

⁴M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Ed. I, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 160.

Piagam Jakarta. Bahkan, sepertinya ada inisiatif dari pemerintah membangkitkan kembali praktik tanggung jawab kementerian kepada parlemen. Pemimpin Angkatan Darat melihat tindakan-tindakannya bukan merupakan pengambilalihan kekuasaan secara penuh.⁵

Penetapan Soeharto sebagai presiden secara utuh oleh MPRS pada bulan Maret 1968 sebagai awal kemunculan Orde Baru yang dinilai semakin kuat. Walau begitu, Soeharto sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintah Orde Baru dihadapkan pada persoalan inti terkait format politik seperti apa yang seharusnya atau sebaliknya tumbuh dan berkembang sehingga kelak menjadi sebuah mekanisme yang dapat digunakan untuk keperluan membangun kembali perpolitikan di Indonesia. Format politik baru yang dirancang oleh Soeharto diharapkan mampu melahirkan ketenangan dan kestabilan dalam masyarakat. Sejak tahun 1968 terlihat adanya usaha untuk mengurangi kelemahan-kelemahan pada format politik yang dirancang tersebut. Diketahui bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto terdapat pertumbuhan kekuasaan eksekutif berlangsung secara bersamaan dengan pengukuhan posisi militer dan Sekber Golkar dengan tujuan menjadi sumber kekuatan utama pemerintahan Soeharto.⁶

Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 yang melarang semua Pegawai Negeri Sipil termasuk ABRI masuk kegiatan Partai Politik (Parpol) dan menguntungkan Golongan Karya (Golkar). Kebijakan ini masih didukung kebijakan sebelumnya, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1966 yang kemudian disebut *redreshing and refreshing*, maksudnya adalah pembersihan orang-orang yang dekat dengan Bung Karno dan Orde Lama di semua lembaga negara. Banyak orang militer dengan dalih Dwifungsi masuk ke jajaran jabatan-jabatan sipil. Hal ini dianggap belum cukup, karena Golkar juga mendirikan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) yang oleh Leo

⁵Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang*, hlm. 283.

⁶Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), hlm. 47-48.

Suryadinata dianggap banyak peranan Ali Moertopo sebagai orang yang bermain di belakang layar yang dikenal dengan istilah Asisten Pribadi (Aspri).⁷

Melihat proses pengolahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) 1971 yang begitu panjang selama 3 tahun, sudah dapat diketahui bahwa ada kepentingan politik tertentu yang harus diperhitungkan. Dalam hubungan ini Sekretariat Bersana Golongan Karya (Sekber Golkar) mendapat keuntungan karena mendapat perlakuan yang berlebihan dari pemerintah, di samping mendapat bantuan dari ABRI. Pemilu 1971 diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971, diikuti oleh: Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Sekber Golkar, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Murba, Partai Nasional Indonesia (PNI), Pergerakan Tarbiyah Islamiah (Perti), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dalam Pemilu ini Sekber Golkar dengan tema sentral “politik no, pembangunan yes” dan dengan dukungan dari ABRI tampak lebih mengena kampanyenya di mata rakyat sambil mengungkit-ungkit kegagalan dan kelemahan Partai Politik (Parpol) di masa lalu untuk menarik massa Parpol dan sekaligus dalam rangka melumpuhkan Parpol.⁸

Pada tanggal 27 Januari 1971 mendekati Pemilu pertama Orde Baru, Presiden Soeharto di depan para gubernur, walikota, bupati dan pejabat pemerintahan dalam negeri seluruh Indonesia mengatakan bahwa demam Pemilu yang sekarang sudah mulai terasa, harus dijaga agar demam itu jangan sampai parah. Sebab sebelum Pemilu dan masa kampanye, undang-undang harus dijaga, agar stabilitas politik bertambah kuat, sehingga dapat dihindari guncangan yang terjadi menjelang Pemilu. Pada kesempatan itu Presiden mengingatkan bahwa masalah ideologi bukan persoalan dan tidak boleh dipersoalkan lagi karena ideologi kita sudah jelas yaitu Pancasila.⁹

⁷Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010*, hlm. 207.

⁸Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm. 167-168.

⁹“Kepala Daerah Jangan Pentingkan Diri Sendiri”, dalam *Suara Merdeka*, 28 Januari 1971.

Di Jalan Tengku Umar Nomor 40 kediaman ketua MPRS Abdul Haris Nasution, memberikan keterangan pers pada masa kampanye Pemilu tahun 1971 yang menegaskan larangan bagi anggota ABRI untuk ikut mengadakan kampanye, sebab ABRI sudah disediakan jatah anggota DPR, yang diperlukan ialah sebagai pengamanan. A.H Nasution mengutarakan juga permasalahan yang dihadapi saat Pemilu berkisar pada permasalahan usaha menyukseskan Pemilu, memenangkan UUD 45 dan Pancasila.¹⁰

Hasil dalam rapat umum yang diselenggarakan pada 3 Juli 1971 telah diumumkan pada tanggal 7 Agustus 1971 oleh Panitia Pemilihan Indonesia di Gedung Pola, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh wakil-wakil Parpol dan Golkar serta undangan lainnya. Hasil perhitungan resmi nasional yang dilakukan oleh PPI menempatkan Golkar di posisi teratas dengan perolehan kursi DPR sebanyak 227 kursi, disusul NU dan Parmusi yang masing-masing mendapatkan 58 kursi dan 24 kursi¹¹. Ada sedikit perbedaan dengan hasil Pemilu tahun 1971 di DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta sekaligus selaku ketua PPD I DKI Jakarta, di hadapan pers baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 5 Juli 1971 mengumumkan hasil Pemilu untuk DPR tingkat I DKI Djaya, menempatkan Golkar dengan suara tertinggi sebanyak Sekber Golkar 772.791 suara, NU 408.959 suara, PNI 198.431 suara¹²

Sulit untuk dipungkiri bahwa hasil Pemilu tersebut merupakan sebuah wujud nyata dari suksesnya Pemerintahan Soeharto dalam bidang politik. Dari sini terdapat perbedaan yang jelas antara Soekarno dan Soeharto. Kalau Soekarno menonjolkan kekuasaannya berdasarkan pengaruh kharismanya sebagai seorang pemimpin dan kecerdikannya dalam memegang keseimbangan antara kekuatan-

¹⁰“Djendral Nasution: Logislah Larangan bagi ABRI untuk Berkampanye”, dalam *Kompas*, 14 Juni 1971.

¹¹“Hasil Resmi Pemilihan Umum 3 Juli 1971”, dalam *Kompas*, 9 Agustus 1971.

¹²“Golkar Top Leading dalam Pemilu 1971 di Jawa Tengah Juga di Jakarta Raya Golkar Unggul”, dalam *Suara Merdeka*, 6 Juli 1971.

kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, maka Soeharto menonjolkan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif dengan membangun organ-organ politik yang kuat, militer dan Golkar. Sikap teguh pendirian yang ditunjukkan Soeharto telah banyak menolongnya memperlunak radikalisme, maka keberhasilannya merangkul sebagian dari eksponen-eksponen radikal pendukung pemerintah, yaitu KAMI, KAPPI dan KASI, dengan cara mengangkat mereka menjadi anggota parlemen yang terbukti dapat menjinakkan tingkah laku politik mereka di dalam masyarakat.¹³

Pada masa Orde Baru stabilitas dijadikan tolak ukur baik secara langsung maupun tidak langsung terdapat kekuasaan yang sangat efektif di tangan ABRI yang mana pemerintah merasa berkepentingan untuk menekan setiap kekuatan, baik secara organisasi atau individual yang menghambat kelancaran jalannya program yang hendak dilakukan. Dua kelompok militan di dalam masyarakat terkena akibat langsung dari strategi ini, yaitu angkatan muda (pelajar, mahasiswa) serta kelompok Islam, lebih-lebih yang diduga keras adalah terlibat dalam DI/TII ataupun eks Masyumi atau kelompok-kelompok ekstremis lainnya. Di samping kedua kelompok tersebut, kelompok atau individu pun bisa terkena ancaman yang sama jika dinilai pemerintah diperlukan mengambil sikap demikian. Masing-masing kelompok atau perorangan itu selalu dikenai tuduhan subversi. Dengan demikian maka pemerintah merasa aman, bisa berbuat apa saja, takkan ada kekuatan yang bisa menyaingi apalagi untuk menghentikannya.¹⁴

Pemilihan Umum tahun 1977 semakin memantapkan posisi ABRI dan Golongan Karya (Golkar) dalam sistem politik yang diwarnai oleh polarisasi sosial politik baru berhubung adanya penyederhanaan Partai Politik (Parpol) setelah Pemilu tahun 1971. Di balik sukses bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu ketiga ini terdapat pula keresahan sebagai hasil dari ketidakpuasan sebagian pihak, terutama di kalangan Parpol. Disinyalir adanya kecurangan-kecurangan dalam

¹³Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, hlm. 52-53.

¹⁴Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm.166.

Pemilu. Khusus menyangkut ABRI, masyarakat awam menilai bahwa ABRI dalam ikut mengamankan Pemilu telah memberikan angin segar buat kemenangan salah satu kontestan Golkar. Pelaksanaan Pemilu di daerah-daerah pelosok, di desa-desa diperkirakan terlalu banyak dicampuri oleh pihak keamanan.¹⁵

Dengan hasil Pemilu yang diraih Golkar pada tahun 1971, ditambah dengan masih dimungkinkannya kekuatan ampuh lainnya, ABRI, untuk mendukung berdiri kokohnya Golkar, secara matematis di atas kertas Golkar menang bersaing bersama kekuatan politik lainnya. Dengan persiapan atau konsep yang telah matang selama ini akhirnya keinginan pemerintah menjadi kenyataan, yaitu difusikannya beberapa buah Partai Politik (Parpol) yang telah memiliki ideologi masing-masing ke dalam dua buah Parpol: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan lambang Ka'bah untuk menampung Nahdatul Ulama (NU); Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk menghimpun lima buah Parpol, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI); Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI); Murba, Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). PPP telah secara sah berdiri sejak tanggal 5 Januari 1973, disusul oleh PDI pada tanggal 10 Januari 1973.

Bagi pemerintah sendiri, seperti termuat dalam salah satu konsiderans Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar), "Dengan adanya tiga organisasi sosial politik tersebut, diharapkan agar Parpol dan Golkar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan."¹⁶

Hasil Pemilu yang diumumkan tanggal 6 Mei 1977 oleh Lembaga Pemilihan Umum dari perolehan suara ketiga kontestan Pemilu tahun 1977 tanggal 2 Mei 1977, Golongan Karya (Golkar) memperoleh suara terbesar nasional dalam Pemilihan Umum tahun 1977, dengan perolehan suara sebanyak 61,90 persen suara

¹⁵Karim, *Peranan ABRI dalam Politik: dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia 1965-1979*, hlm. 69-70.

¹⁶Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm. 172-173.

dikuti oleh PPP dan PDI dengan perolehan suara masing-masing sebesar 29,40 persen dan 8,70 persen suara. Golkar dalam penghitungan suara yang masuk, unggul di 25 Provinsi dari total 27 Provinsi di seluruh Indonesia.¹⁷ Dilihat dari pelaksanaan Pemilihan Umum kali ini ada dua hal menarik yang patut dicatat dalam membicarakan kekuatan politik di Indonesia yaitu bahwa Golkar kalah di dua daerah, yaitu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan di Daerah Istimewa Aceh.¹⁸

Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah; mengapa Golkar mengalami kekalahan dalam Pemilu 1977 di DKI Jakarta. Golkar sebagai kontestan Pemilu dan didukung oleh pemerintah dengan kekuatan militer di segala aspek yang diharapkan mampu memegang kendali Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai peserta Pemilu tahun 1977, tetapi tidak memperoleh kemenangan khususnya di Ibukota negara DKI Jakarta yang dipandang sebagai barometer kekuatan politik nasional pada Pemilu tahun 1977 dianggap cukup mengejutkan karena Pemilu tahun 1977 dianggap sebagai tonggak dari tahap berikutnya. Bagaimana prospek terhadap pertumbuhan lebih lanjut dari Demokrasi Pancasila. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam skripsi ini diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi politik dan partai-partai di DKI Jakarta tahun 1977?
2. Bagaimana pelaksanaan Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta?
3. Bagaimana implikasi sikap politik Pemerintah terhadap Kekalahan Golkar pada Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta?
4. Mengapa Golkar mengalami kekalahan pada Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta?
5. Apa penyebab mantapnya posisi politik PPP setelah Pemilu 1977 di DKI Jakarta ?

¹⁷“Golkar Kejar PPP di Kalsel; Prosentase Naik 61.9 %, PPP 29,4%, & PDI 8,7%”, dalam *Suara Merdeka* tanggal 7 Mei 1977.

¹⁸Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm. 183-184.

B. Ruang Lingkup

Secara sederhana sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia di masa lampau yang dimulai sejak adanya bukti tertulis. Dalam pembahasan suatu penelitian, ruang lingkup mutlak diperlukan mengingat luasnya masalah dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada sudah sewajarnya dibatasi sesuai topik yang diangkat oleh karena itu sangat dibutuhkan ruang lingkup. Ruang lingkup juga membantu agar penelitian dalam skripsi ini pembaca tidak terjerumus ke dalam pembahasan yang luas.¹⁹ Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni temporal, spasial, dan keilmuan.

Lingkup temporal pada skripsi ini lebih ditekankan pada tahun 1975. Tahun 1975 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan dikeluarkannya Undang-Undang No.4 Tahun 1975 yang dipakai sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 1977, sedangkan tahun 1977 dipilih sebagai batas akhir kajian dengan dasar bahwa pada tahun tersebut, Golkar tidak mampu memperoleh suara mayoritas masyarakat DKI Jakarta pada Pemilu 1977.

Ruang lingkup spasial sangat erat hubungannya dengan batasan wilayah atau letak geografis. Pembatasan lingkup spasial ini bertujuan supaya penulisan sejarah dapat mendalam karena mengungkapkan kejadian-kejadian lokal.²⁰ Sesuai dengan judul skripsi yaitu: “Kekalahan Golkar dalam Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta”, disini hanya akan menguraikan kondisi partai politik dan perpolitikan di DKI Jakarta pada tahun 1977.

Lingkup yang terakhir adalah lingkup keilmuan. Agar didapat karya sejarah yang bersifat analitis maka dalam penulisan skripsi ini dipakai ilmu bantu, yaitu ilmu-ilmu sosial yang lain. Hal ini bertujuan untuk memperkuat atau mempertajam analisis tentang Pemilu, khususnya dalam Kekalahan Golkar di DKI Jakarta.

¹⁹Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.28.

²⁰Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Sejarah Deduktis, dalam Lembaran Sejarah No. 6* (Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1970), hlm. 38.

Lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah politik. Kajian sejarah politik dapat didefinisikan sebagai sejarah dari sistem politik atau negara yang menyangkut proses yang menentukan tujuan politik bersama, misalnya kepentingan negara, kelompok penekan, kelompok kepentingan, elite politik, pendapat umum, peranan partai, dan Pemilu. Beberapa hal yang dibahas dalam sejarah politik, misalnya faktor yang menentukan dalam kemampuan Partai Politik (Parpol) dalam memenangkan Pemilu karena didukung oleh salah satu faktor, yaitu ikatan historis. Ikatan historis tersebut, tidak mudah untuk dilepaskan, sekalipun sudah ada gagasan untuk melepaskannya dan memperluas basis partai, misalnya dengan menghubungkan konteks sosial, politik, dan agama seperti perjuangan politik yang ditawarkan peserta Pemilu, kondisi perpolitikan, dan kekuatan tokoh politik dalam mempengaruhi suara pemilih DKI Jakarta.²¹

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan batasan ruang lingkup di atas, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang situasi politik dan Partai Politik di DKI Jakarta.
2. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta.
3. Menganalisis tentang implikasi sikap politik Pemerintah terhadap Kekalahan Golkar pada Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta.
4. Menganalisis tentang terjadinya kekalahan Golkar pada Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta.
5. Menganalisis tentang penyebab mantapnya posisi politik PPP setelah Pemilu 1977 di DKI Jakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini peristiwa Pemilu di DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 1977 belum pernah ditulis secara spesifik dan tuntas. Memang ada beberapa hasil penelitian tentang

²¹Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 25.

Pemilu di DKI Jakarta, tetapi tidak secara khusus membahas sejarah kekalahan Partai Politik (Parpol).

Buku pertama, adalah karya R. William Liddle, berjudul *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*.²² Secara ringkas buku ini membahas tentang Pemilu Indonesia pada masa Orde Baru yang dimulai dari Pemilu pertama tahun 1971, 1977, dan terakhir tahun 1986. Liddle menunjukkan dalam bukunya bagaimana rangkaian pemungutan suara dapat dikelola sekaligus dikendalikan secara sangat terstruktur dan ketat, untuk menegaskan legitimasi pemerintah terhadap rakyat dan dunia luar, dan secara bersamaan untuk menghindari pertarungan nyata di antara kekuatan politik yang sedang bersaing.

Penulis berpendapat, bahwa buku tersebut relevan dengan studi yang disusun oleh penulis. Relevansi tersebut terletak pada pernyataan bahwa rangkaian pemungutan suara pada Pemilu Orde Baru dapat dikendalikan secara terstruktur guna menegaskan legitimasi pemerintah kepada rakyat. Kesamaan lingkup temporal pada buku tersebut juga memperkuat relevansi dengan studi yang disusun oleh penulis yang juga membahas mengenai Pemilu 1977.

Perbedaan buku ini dengan kajian yang disusun terletak pada pembahasan lingkup tempat dan waktu yang relatif luas dan panjang, yaitu Pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru dari tahun 1971 sampai 1986. Kajian yang disusun mengambil skop tempat dan waktu relatif kecil dan sempit, yaitu Pemilu di Jakarta pada tahun 1977. Harapan penulis setelah kajian ini tersusun untuk dapat melengkapi, dan menguraikan kekosongan terutama berkaitan dengan faktor penyebab kekalahan peserta pemilu pada masa Orde Baru di DKI Jakarta.

Buku kedua, adalah buku karya David Reeve, berjudul *Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran, dan Dinamika*.²³ Secara singkat buku ini membahas sejarah 70 tahun Golkar mulai dari asal muasal pembentukan Golkar yang pada

²²R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1992).

²³David Reeve, *Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran, dan Dinamika* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).

masa pemerintahan Soekarno terilhami pembentukan golongan fungsional yang bertujuan menjadikan Indonesia menjadi negara satu partai, demi tujuan politik jangka pendek yaitu memenangkan Pemilu bagi Orde Baru.

Relevansi buku ini dengan kajian yang disusun terletak pada runtutan peristiwa yang dialami Golkar terutama sejak Golkar digunakan sebagai alat politik Soeharto dalam Pemilu Orde Baru. Dalam buku ini sempat disinggung mengenai kalahnya Golkar dalam Pemilu tahun 1977 yaitu di Aceh dan DKI Jakarta, tetapi tidak disebutkan penyebab kekalahan Golkar di dua wilayah tersebut. Hal ini berguna bagi kajian yang dilakukan dapat melihat dan menganalisis sejauh mana Soeharto dapat memenangkan Golkar dalam Pemilu di berbagai daerah Indonesia terutama Pemilu tahun 1977 di Jakarta. Harapan penulis setelah kajian ini tersusun untuk dapat melengkapi dan menguraikan secara jelas Pemilu tahun 1977 terutama mengenai penyebab kekalahan Golkar di Jakarta.

Buku ketiga, adalah buku karya Yopi Kristanto, berjudul *Bersenandung Dalam Politik: Musik dan Musisi Pada Pemilu Orde Baru 1971-1997*.²⁴ Isi ringkas buku ini membahas keberadaan hiburan musik dalam kampanye Pemilu Orde Baru terutama di kampanye Pemilu Golkar guna mengundang simpatisan Partai Politik (Parpol) untuk datang ke acara kampanye. Pada kampanye Pemilu setelah Pemilu pertama Orde Baru diselenggarakan, Parpol lain seperti PPP dan PDI mulai mengundang para musisi untuk memeriahkan dan menarik dukungan terhadap partai yang dibelanya.

Relevansi buku ini dengan dengan kajian yang disusun terletak pada bagaimana pengaruh musik dan musisi bagi partai peserta pemilu guna menarik dan meraih dukungan masyarakat. Kekalahan Golkar Pada Pemilu Tahun 1977 di Jakarta, juga disebabkan oleh kecerdikan PPP dalam memanfaatkan musik dan nama besar musisi sebagai pengisi sekaligus juru kampanye mereka. Perbedaan buku ini dengan kajian yang disusun adalah buku ini lebih banyak membahas mengenai daya tarik musik dan musisi selama Pemilu Orde Baru, sedangkan kajian

²⁴Yopi Kristanto, *Bersenandung dalam Politik: Musik dan Musisi pada Pemilu Orde Baru 1971-1997* (Yogyakarta: Penerbit Dialog Pustaka, 2018).

yang penulis susun lebih mengarah pada faktor penyebab kalahnya Golkar dalam Pemilu di DKI Jakarta. Harapan penulis setelah kajian ini tersusun dapat melengkapi kekosongan sekaligus faktor penyebab kekalahan peserta Pemilu, selain daya tarik musik dan musisi selama masa kampanye terutama kampanye Pemilu tahun 1977.

Buku keempat, adalah buku karya Syamsuddin Haris, berjudul *PPP dan Politik Orde Baru*.²⁵ Isi ringkas buku ini adalah membahas mengenai penampilan PPP sebagai partai Islam yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah sehingga penggunaan simbol Ka'bah dan idiom Islam dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sejak keikutsertaan PPP pada Pemilu 1977 terasa memikat Pemilih Islam baik massa Islam di perkotaan dan pedesaan. Relevansi buku ini dengan kajian yang disusun terletak pada penggunaan ideologi dan atribut Islam dalam menarik pemilih Islam perkotaan dan pedesaan dalam kampanye Pemilu dan beberapa faktor lain, misalnya Golkar kurang merangkul Pemilih Islam serta memperlakukan penggunaan simbol partai oleh PPP dalam kampanye Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta.

Relevansi buku ini dengan kajian yang disusun terletak pada konflik berkepanjangan baik dari dalam maupun dari luar PPP. Kajian yang disusun lebih mengarah kepada Golkar sebagai Partai Politik (Parpol) pemerintah dalam Pemilu Orde Baru, namun bisa mengalami kekalahan di Ibukota DKI Jakarta. Harapan setelah kajian ini tersusun adalah dapat melengkapi karya dalam buku tersebut, yaitu kekuatan dari PPP dalam mempengaruhi basis pemilih Islam.

Buku kelima, adalah buku karya Cornelis Lay, berjudul *Melawan Negara: PDI 1973-1986*.²⁶ Isi ringkas buku ini adalah membahas sikap PDI yang mengungkapkan secara terang-benderang karakter sesungguhnya negara di bawah pemerintahan Orde Baru dan perdebatan-perdebatan politik pada masa Orde Baru.

²⁵Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta: PT. Grasindo, 1991).

²⁶Cornelis Lay, *Melawan Negara: PDI 1973-1986* (Yogyakarta: JPP UGM, 2010).

Orde Baru mencitrakan diri sebagai magnet yang menarik apapun yang berwatak keras, bahkan mereka yang berkarat untuk bergabung dengannya, dan mengokohkan hegemoni negara.

Relevansi buku ini dengan kajian yang disusun terletak pada konflik kontestan Pemilu terutama PDI dengan para elit Orde Baru mulai dari saat terjadinya fusi Partai Politik (Parpol), proses penyelenggaraan Pemilu, dan kongres PDI. Selain itu, pembahasan buku ini dimulai dari tahun 1973 atau menjelang terselenggaranya Pemilu 1977. Kajian yang ditulis ini dimulai dari tahun 1975 pada saat disahkannya UU Pemilu No.3 Tahun 1975. Jadi, buku ini menurut penulis merupakan suatu urutan peristiwa menjelang terselenggaranya Pemilu tahun 1977. Harapan penulis dengan kajian yang sedang disusun, yaitu dapat melengkapi peristiwa dalam buku ini terutama kiprah Parpol, yaitu PDI dalam Pemilu 1977 di DKI Jakarta.

Pustaka yang terakhir, adalah thesis yang berjudul *Program PPP dan PDI Selama Kampanye Pemilu Tahun 1982-1987: Studi Pergeseran Program Kampanye*, yang disusun oleh Kris Nugroho tahun 1994. Isi ringkas dari thesis ini adalah membahas mengenai penetapan Pancasila oleh pemerintah Orde Baru sebagai satu-satunya asas Partai Politik (Parpol) dan program-program kampanye Parpol berorientasi pada masalah-masalah nyata kemasyarakatan dan kenegaraan sebagai sumber program masing-masing kontestan Pemilu dan tidak lagi berorientasi pada ciri ideologi masing-masing Parpol, seperti agama, demokrasi, dan nasionalisme. Sikap dan perilaku politik PPP dan PDI pada Pemilu 1977 menyebabkan Pemerintah Orde Baru mengeluarkan intruksi terkait penggunaan asas atau ciri ideologi politik, yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan program kampanye, baik bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya selama dua penyelenggaraan Pemilu, yaitu Pemilu 1982 dan Pemilu 1987. Intruksi terhadap masing-masing kontestan dilatarbelakangi keresahan Pemerintah Orde Baru terkait panasnya situasi dalam pelaksanaan Pemilu 1977 akibat penggunaan identitas oleh masing-masing kontestan Pemilu.

Adanya kesamaan program politik, ekonomi, dan sosial politik masing-masing kontestan pada Pemilu 1982 dan 1987 membuat tema aktual yang

berkembang berkisar pada masalah kebebasan politik bagi PNS dan mahasiswa, penghapusan massa mengambang, asas Luber dalam Pemilu dan pemulihan hak-hak politik rakyat. Program Ekonomi berkisar pada tema pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat kecil. Program Sosial-budaya berkisar pada masalah pendidikan dengan isu yang menonjol penghapusan PPP dan kebebasan dalam kehidupan kampus. Pergeseran program politik merupakan wujud dari penerimaan Asas Pancasila sebagai asas tunggal masing-masing kontestan Pemilu yang direalisasikan dalam bentuk membatasi penggunaan isu-isu politik keagamaan (PPP) dan marhaenisme (PDI). Perubahan sikap dan perilaku kontestan pada Pemilu 1982 dan 1987 menunjukkan sikap politik yang lebih pragmatis dalam penyampaian program politik dan upaya dari kontestan Pemilu untuk membatasi diri dan tidak lagi menonjolkan aspek primordial dan ideologi seperti pada Pemilu 1977.

Relevansi Thesis dengan kajian yang sedang disusun adalah sama-sama membahas mengenai materi kampanye pada Pemilu Orde Baru yang dibawakan masing-masing peserta dengan tujuan memenangkan Pemilu. Relevansi lain yang terdapat dalam thesis dengan kajian yang sedang disusun adalah Thesis ini menguraikan perbedaan materi kampanye saat asas tunggal Pancasila diberlakukan yaitu tahun 1982 dan 1987, sedangkan kajian yang sedang penulis susun menguraikan beberapa materi kampanye sebelum asas tunggal Pancasila diberlakukan. Jadi bisa dianggap thesis tersebut dan kajian yang sedang disusun merupakan suatu urutan peristiwa. Perbedaan thesis ini dengan kajian yang disusun adalah fokus penelitian yang dibahas. Harapan penulis dengan kajian yang sedang disusun, yaitu dapat melengkapi kajian tentang studi kampanye Partai Politik (Parpol) dalam pemilihan umum terutama di DKI Jakarta.²⁷

²⁷Kris Nugroho, *Program PPP dan PDI Selama Kampanye Pemilu Tahun 1982-1987: Studi Pergeseran Program Kampanye* (Depok: Universitas Indonesia, 1994).

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Arbi Sanit di dalam bukunya berjudul *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, “Pemilihan umum adalah lembaga dan proses politik demokrasi yang berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan dan perwakilan.”²⁸

Menurut Syamsuddin Haris di dalam bukunya berjudul *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, “Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*refresntative government*) yang menurut Dahl, merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi pada zaman modern.”²⁹

Menurut David Reeve dalam bukunya berjudul *Golkar Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika*, dan mengutip pernyataan Soekarno dalam pidatonya pada bulan Maret 1959, “Demokrasi tidaklah melalui partai-partai tetapi golongan fungsional. Partai-Partai dianggap perwakilan politik dan (golongan) karya sebagai perwakilan sosio-ekonomi. Pemikiran ini mengarah pada perubahan dari orientasi partai menjadi golongan fungsional. “MPR yang terdiri dari perwakilan golongan fungsional akan menjamin hubungan keluarga yang lebih harmonis”. Angkatan Bersenjata sebagai golongan fungsional yang dicetuskan Soekarno, memberikan legitimasi secara konstitusional bagi partisipasi Angkatan Darat (AD) dalam politik dan bahkan dalam semua bidang kehidupan nasional.”³⁰

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak

²⁸Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 85.

²⁹Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 7.

³⁰David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 156-160.

efektif”. Salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah Partai Politik (Parpol). Menurut Sigmund Neumann, “Partai Politik adalah organisasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, Parpol merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang luas”.³¹

Partai Politik (Parpol) juga mempunyai fungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat berada; proses itu juga mencakup proses masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masa kampanye diperlukan sosialisasi politik yang dilakukan Parpol kepada masyarakat. Adapun sosialisasi politik dilakukan secara:

- a. Sosialisasi politik dilakukan mulai dari jumlah massa yang kecil, seperti; orang ke orang, kerabat, keluarga.
- b. Sosialisasi politik diselenggarakan melalui beragam lembaga dan kegiatan, seperti; pendidikan formal dan informal, media massa seperti radio dan televisi, dan Parpol.
- c. Sosialisasi politik diselenggarakan melalui kursus-kursus pendidikan partai, dan menanamkan nilai-nilai ideologi, dan loyalitas kepada negara dan partai, seperti pendidikan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.³²

Di Jakarta Pemilu 1977 diikuti oleh tiga peserta Pemilu, dua Partai Politik (Parpol), yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar). Rupanya PPP berdasarkan kerangka teoritik

³¹Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 5.

³²Miriam Budihardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 2- 16.

yang saya sebutkan di atas, PPP melakukan sosialisasi politik dalam Pemilu tahun 1977 melalui beberapa macam pendekatan.

Pertama, PPP menanamkan nilai-nilai ideologi sehingga tertanam loyalitas kepada partai, seperti: identitas yang melekat pada partai PPP sebagai partainya orang Islam, baik secara agama dan cara hidup yang belum hilang kekuatannya sebagai pijakan puluhan juta pemeluknya terutama di DKI Jakarta. Kedua, PPP melakukan sosialisasi politik secara kelembagaan dan beragam kegiatan, seperti; Kader PPP baik tingkat pusat sampai daerah, memegang sebagian besar struktur kader Nahdatul Ulama dan melalui kegiatan keagamaan Islam di beberapa tempat di DKI Jakarta. Ketiga, PPP melakukan sosialisasi politik dari jumlah massa yang kecil, seperti: Fusi Partai yang dilakukan pemerintahan Orde Baru berdasarkan ideologi partai, yang mana PPP berbasis ideologi Islam disamping ideologi Pancasila, terdiri dari empat partai Islam yaitu: Perti, Parmusi, Masyumi dan NU. Hal itu membuat PPP lebih mudah dalam menyatukan seluruh umat Islam di belakang partai dan simbol Ka'bah.³³ Hal itu menyebabkan PPP memiliki penambahan perolehan suara nasional pada Pemilu 1977, dan kemenangan Pemilu 1977 di DKI Jakarta.

Menurut Arbi Sanit dalam bukunya *Partai Pemilu dan Demokrasi*, kekuatan Partai Politik (Parpol) yang memenangkan kontestasi dalam Pemilihan Umum karena didukung oleh salah satu faktornya ialah ikatan historis, sebagaimana PPP secara historis tidak terlepas dari umat Islam Indonesia yang menjadi mayoritas di Indonesia secara umum dan secara khusus di DKI Jakarta. Ikatan historis tersebut, tidak mudah untuk dilepaskan, sekalipun sudah ada gagasan untuk melepaskannya dan memperluas basis partai kepada semua golongan masyarakat Indonesia. PPP sudah diidentifikasi oleh masyarakat sebagai partainya umat yang tidak menerima prinsip sekularisasi dan sekularisme serta ingin mandiri dari penguasa dan pemerintah.³⁴

³³R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1992), hlm. 66.

³⁴Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, hlm. 25.

Menurut UU No. 4 tahun 1975, Pelaksanaan Pemilu tahun 1977 didasarkan pada asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Rumusan asas tersebut sudah dapat dipandang sempurna apabila dilandaskan pada pendapat bahwa pemilih mempunyai kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara netral dalam artian bahwa pelaksanaan Pemilu mampu menjamin keberlakuan itu secara formal dan materiil. Pelaksanaan Pemilu, Menurut Prihatmoko, memiliki tiga tujuan dalam pelaksanaannya, yaitu: a.sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum, b.sebagai pemindahan konflik kepentingan, dari rakyat ke badan-badan perwakilan rakyat, melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin, c.sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.³⁵

Membahas mengenai Partai Golkar dan kekalahannya, akan sangat tepat jika dianalisis melalui pendekatan sosiologi politik. Sosiologi politik memusatkan kajiannya pada tingkah politik yang dipengaruhi oleh bermacam-macam proses sosial, seperti kerjasama, persaingan, konflik, dan lain-lainnya.³⁶ Sosiologi politik adalah suatu metode yang dapat menerangkan masalah interaksi dan interelasi suatu sistem dalam masyarakat baik pada strukturnya maupun pada tindakan kulturalnya. Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara. Secara khusus, sosiologi politik mengkaji kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program-program publik yang ditetapkan pemerintah.

Tujuan pembahasan sosiologi politik adalah menciptakan kelompok masyarakat yang demokratis dan terjaganya stabilitas dalam kehidupan berpolitik.³⁷ Berdasarkan kajian-kajian tersebut akan sangat membantu membahas

³⁵Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP2I, 2003), hlm. 19.

³⁶F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 82.

³⁷Basrowi, dkk., *Sosiologi Politik* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 5-6.

detail dari penulisan skripsi ini. Berkaitan dengan analisis terhadap tingkah laku politik, maka persaingan dan konflik yang timbul di dalam pelaksanaan organisasi Partai Golkar dan kekalahannya di Jakarta sebagai salah satu proses sosial. Hal tersebut menjadi bagian utama dalam studi tentang kekalahan sebuah Partai Politik (Pарpol), dalam sudut pandang ilmu sosiologi politik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dengan menggunakan metode sejarah, sejarawan berusaha merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari peristiwa masa lampau.³⁸ Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), sintesis, dan penulisan (historiografi).³⁹

Dalam skripsi ini, sumber-sumber yang digunakan berasal dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Pusat Data Kompas, dan Pusat Data Suara Merdeka.

Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Arsip Surat Kabar sejaman yang diperoleh di Perpustakaan Nasional Koran Salemba seperti, Suara Karya, Sinar Harapan, Harian Merdeka, Pikiran Rakyat, Berita Buana, Majalah Tempo, dan Harian Kompas.

Sumber sekunder diperoleh dengan cara melakukan riset kepustakaan yang berupa bahan karya ilmiah dan buku karya para sarjana dan ahli yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Sumber sekunder digunakan untuk melengkapi

³⁸Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

³⁹Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22- 23.

data yang tidak ditemukan dari sumber primer dalam rangka yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Setelah pengumpulan sejarah dipandang cukup, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber melalui kritik ekstern dan intern.⁴⁰ Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentisitas dan keaslian sumber. Oleh karena banyak dokumen yang dikeluarkan pihak ANRI merupakan salinan dari aslinya, maka harus dikolaborasikan dengan sumber lainnya. Langkah itu penting mengingat dokumen yang diragukan keasliannya akan mempengaruhi kredibilitasnya. Untuk itu, selain dilakukan kritik ekstern juga dilakukan kritik intern untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya.

Tahap berikutnya adalah kegiatan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan peristiwa Kekalahan Golkar dalam Pemilu 1977 di DKI Jakarta dan dampaknya terhadap suara pemilih di DKI Jakarta pada Pemilu Orde Baru berikutnya melalui imajinasi, interpretasi, dan teorisasi untuk mencari hubungan suatu fakta dengan fakta lain dalam rangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dalam hal ini membandingkan informasi satu dengan yang lain dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang relevan. Dengan demikian peristiwa Kekalahan Golkar dalam Pemilu 1977 di DKI Jakarta dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antara Kekalahan Golkar dalam Pemilu 1977 DKI Jakarta terhadap perpolitikan di Indonesia.

Tahap terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahap ini fakta-fakta yang sudah diinterpretasikan dijelaskan dalam bentuk tulisan sejarah, kemudian disusun secara kronologis, komprehensif dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya dipahami baik oleh para pembaca.

⁴⁰Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini sehingga tidak sebatas sampai pada penjelasan terhadap kerangka pemikiran saja. Akan tetapi juga dilengkapi dengan penjelasan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca sehingga lebih dulu dapat memahami bagaimana urutan penjelasan yang akan disampaikan dalam penelitian ini. Tujuan lainnya yaitu agar penulis dapat memastikan langkah-langkah penyampaian materi dalam penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penelitian, agar urutan penjelasannya dapat dijelaskan dengan jelas dan sistematis.

Untuk memberikan gambaran tentang latar belakang kekalahan Golkar di Jakarta dalam Pemilu tahun 1977, maka penulisan ini perlu diperinci dalam beberapa bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan permasalahan, yang berisi alasan pemilihan tema penelitian dan berbagai hal yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Ruang lingkup berisi pembatasan sejarah, dalam penulisan penelitian ini terdapat tiga batasan, yaitu temporal, spasial, dan keilmuan. Lingkup spasial yang dibahas dalam skripsi ini adalah lingkup DKI Jakarta, sementara lingkup temporal yang dibahas dalam skripsi ini adalah rentang waktu 1975-1977. Tinjauan pustaka, yaitu penggunaan bahan-bahan atau sumber-sumber buku yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini memuat buku dan literatur yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi. Kerangka Pemikiran, yaitu penggunaan teori dari penulisan skripsi, menggunakan teori ilmu apa untuk menulis dan meneliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berisi konsep-konsep dan teori yang dipakai terutama teori politik. Metode penelitian berisi metode yang digunakan dalam mengumpulkan sumber, yaitu metode sejarah yang terdiri dari: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Bab II Situasi Politik dan Partai Politik (Parpol) Tahun 1977 di DKI Jakarta, pada bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu *Pertama* situasi politik dan Parpol yang membahas tentang situasi politik DKI Jakarta menjelang Pemilu 1977, latar belakang situasi politik DKI Jakarta menjelang Pemilu 1977 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penerapan secara murni Pancasila dan UUD 1945, penegakan

kekuatan pemerintah pusat, dan pelaksanaan penyederhanaan sistem kepartaian. *Kedua* yaitu membahas tentang Profil Golkar DKI Jakarta yang meliputi latar belakang pembentukan Golkar DKI Jakarta, Visi-misi, tujuan, doktrin dan ikrar Golkar DKI Jakarta, dan terakhir tugas DPD I Golkar DKI Jakarta. Pada subbab kedua ini, akan dibahas secara garis besar mulai dari pendirian DPD Golkar DKI Jakarta dimulai dari saat pemberlakuan Undang-Undang Darurat Perang yang mengakibatkan pembentukan golongan fungsional tahun 1957 hingga pembentukan pengurus daerah Golkar DKI Jakarta dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 1977. Pembahasan lain pada subbab kedua secara garis besar meliputi, sasaran-sasaran Golkar DKI dalam jangka waktu lima tahun ke depan, dan tugas DPD I Golkar DKI Jakarta dalam berbagai bidang kerja pada satu periode kepengurusan. *Ketiga* yaitu membahas tentang politik fusi penantang Golkar dalam Pemilu 1977 di DKI Jakarta. Intisari dari pembahasan subbab ini, yaitu ide Soeharto terkait pengelompokan partai amat mendesak pimpinan masing-masing parpol untuk segera merealisasikan ide tersebut. Dalam subbab ini pula akan dicantumkan tabel-tabel berisi data-data yang berkaitan dengan sembilan Parpol yang mengabungkan diri kedalam dua wadah spirituil-materil dan materil-spirituil, yaitu PPP dan PDI.

Adapun maksud dari uraian Bab II adalah dengan pertimbangan bahwa kontestasi sebuah Partai Politik (Parpol) dalam Pemilu tidak bisa dilepaskan dengan situasi menjelang penyelenggaraan Pemilu baik situasi politik maupun Parpol terutama situasi penyelenggaraan Pemilu pada periode sebelumnya.

Bab III Pelaksanaan Pemilu 1977 di DKI Jakarta, pada bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu *Pertama* dalam subbab pertama dibahas mengenai landasan hukum Pemilu 1977. Landasan hukum pada Pemilu 1977 dianggap perlu untuk dibahas karena pada subbab ini akan memayungi pembahasan subbab berikutnya terutama terkait peserta politik yang ikut meramaikan kontestasi pada Pemilu 1977 di DKI Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 terkait Partai Politik (Parpol) dan Golongan Karya. Pembahasan tersebut dirasa perlu, karena peneliti ingin agar orang yang membaca menjadi tahu alasan penulis dalam merekonstruksi peristiwa berdasarkan titik awal peristiwa tersebut berlangsung dan pembaca lebih memahami peristiwa yang dirasa tidak mencerminkan aturan yang

telah disepakati bersama. *Kedua* membahas mengenai Parpol peserta Pemilu 1977 di DKI Jakarta. Hal yang menjadi dasar menulis subbab ini, karena dalam membahas peristiwa Pemilu, perlu untuk mengetahui latar belakang Parpol peserta Pemilu yang ikut bersaing dalam persaingan Pemilu 1977 di DKI Jakarta. latar belakang tersebut mulai dari awal mula partai itu dibentuk dan aspirasi yang dibawa dan perjuangkan dalam kontestasi pemilihan umum. Pembahasan pada subbab ini juga berkaitan dengan subbab selanjutnya karena aspirasi masing-masing Parpol akan berhubungan dengan program kampanye pasca sikap politik pemerintah. *Ketiga* membahas penyelenggaraan Pemilu 1977 di DKI Jakarta. Hal yang mendasari penulisan subbab ketiga ini adalah dalam membahas penyelenggaraan Pemilu perlu mengetahui proses dua Parpol tersebut dapat bersaing dalam memperebutkan suara masyarakat terutama masyarakat DKI Jakarta. Selain itu, untuk menarik suara dari masyarakat DKI Jakarta untuk memilih Parpol dalam pemungutan suara, tentu diperlukan program-program yang membuat hati masyarakat tergerak untuk memberikan suara kepada masing-masing Parpol yang nantinya akan mempengaruhi perolehan suara yang didapatkan dan akan dibahas dalam subbab di bab berikutnya. Tujuan pembahasan subbab ini bagi pembaca, yaitu supaya pembaca dapat mengetahui cara-cara yang dilakukan masing-masing Parpol untuk menarik simpati, sehingga nantinya dalam pemungutan suara masyarakat memberikan hak suaranya kepada salah satu Parpol.

Bab IV Kekalahan Golkar Pada Pemilu Tahun 1977 di DKI Jakarta, adalah uraian inti mengenai Kekalahan Golkar dalam Pemilu tahun 1977 di DKI Jakarta. Guna menjelaskan bab ini maka di dalam skripsi dijabarkan dua subbab, yaitu *Pertama* membahas mengenai kekalahan Golkar sebagai implikasi sikap politik pemerintah. Kekalahan Golkar sebagai implikasi sikap politik pemerintah dianggap perlu dibahas karena sikap politik pemerintah memiliki andil besar terhadap perolehan suara yang didapatkan Golkar dalam kontestasi pemilu di suatu daerah. Dijelaskan pula sikap politik pemerintah terutama penggunaan Ideologi Pancasila untuk membungkam oposisi dan melemahkan kekuatan politik Islam dianggap menjadi penyebab dari kegagalan DKI Jakarta menjadi barometer perolehan suara Golkar. Bagian terakhir dari subbab pertama ini akan dijelaskan sebab-sebab yang

kekalahan Golkar di DKI Jakarta dalam persaingan Pemilu 1977 di luar dari sikap politik pemerintah. Maksud pembahasan subbab ini untuk pembaca, yaitu supaya pembaca mengerti letak kesalahan pemerintah dalam hal menempatkan sikap politik di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta yang mengakibatkan kekalahan Golkar pada Pemilu 1977. *Kedua* membahas mengenai pengaruh kekalahan Golkar terhadap para Kontestan Pemilu 1977. Dalam subbab ini terdapat beberapa bagian yang mendukung subbab kedua, yaitu posisi tokoh PDI dan PPP Pemilu 1977, dan posisi politik PPP sesudah Pemilu 1977 di DKI Jakarta. Alasan pembahasan subbab dua ini adalah dua Partai Politik (Parpol) sebagai pesaing utama Golkar mampu menampilkan sepak terjang dalam meraup suara dalam kontestasi Pemilu DKI Jakarta yang sempat diabaikan oleh Golkar dan pemerintah melalui langkah-langkah politik yang dilakukan. Pembahasan subbab kedua berkaitan dengan subbab pertama guna menjelaskan pembahasan bab keempat. Tujuan pembahasan subbab ini bagi pembaca, yaitu supaya pembaca memahami bahwa masing-masing kontestan Pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara baik melalui pengaruh posisi tokoh Parpol dan isu yang dimainkan oleh Parpol yang dapat membuat pergeseran suara pemilih dalam pemungutan suara Pemilu 1977. Hal ini untuk menjawab inti permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Bab V Simpulan, yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan dalam perumusan masalah pada Bab I.